

BAB V

KESIMPULAN

Hubungan buruk antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung sejak Revolusi Islam Iran 1979 membuat Iran menghadapi berbagai tekanan internasional. Kondisi tersebut terus diperparah karena adanya sengketa nuklir Iran. Iran yang terus melakukan program pengayaan uranium dianggap beberapa kali melanggar perjanjian non-poliferasi nuklir dan ketentuan Badan Atom Internasional (IAEA). Sehingga di bawah tekanan internasional, pada 2003 Iran mengumumkan kesediannya untuk menghentikan secara penuh program pengayaan uranium.

Namun tak berlangsung lama, Iran kembali mengumumkan akan terus melakukan pengayaan uranium. Hingga pada puncak sengketanya di masa kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad yang memegang jabatan presiden Iran sejak 2005 hingga 2013 justru meningkatkan pengayaan uranium hingga melebihi kesepakatan dalam perjanjian Non-Poliferasi. Pada tahun-tahun berikutnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran. Resolusi tersebut membuat Iran terisolasi dari dunia internasional karena kerjasama ekonomi yang dibatasi PBB. Sehingga membuat perekonomian Iran terus merosot.

Mencoba bertahan di tengah serangkaian sanksi internasional yang diberikan kepada Iran, Ahmadinejad menjalankan kebijakan "*Look to the East*". Salah satu agenda dari "*Look to the East*" dalam kebijakan luar negerinya, Iran mulai melirik organisasi regional non-Barat yaitu *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO). SCO merupakan reinkarnasi dari *Shanghai Five*, yang didirikan pada tahun 1996 oleh lima negara, yaitu Cina, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan dan Tajikistan. Iran untuk pertama kalinya bergabung dengan SCO pada tahun 2005 dengan status negara

pengamat. Dengan diterimanya Iran sebagai pengamat SCO, dan partisipasinya mendapat respon baik dari negara-negara anggota SCO, Iran kemudian mencoba untuk melangkah menjadi anggota tetap SCO. Pada tahun 2008 Iran secara resmi mendaftarkan negaranya sebagai anggota tetap melalui prosedur formal yang ditetapkan SCO. (Khodaei M. A., 2013, p. 188) Namun Keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap rupanya tersandung peraturan yang dikeluarkan SCO terkait syarat negara anggota tetap. Dimana syarat untuk menjadi anggota tetap SCO adalah negara yang sedang tidak di bawah sanksi internasional.

Setelah masa kepemimpinan Ahmadinejad berakhir, Iran dipimpin oleh Hassan Rouhani. Pada masa pemerintahannya, Rouhani menjanjikan kabinetnya akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perekonomian, menghidupkan lagi etika dan interaksi dengan dunia internasional melalui kebijakan yang moderat. Untuk memenuhi tujuan dan kepentingan nasionalnya, Rouhani melanjutkan keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap di Shanghai Cooperation Organization dan terlihat makin serius. Rouhani juga mencoba terbebas dari rangkaian sanksi internasional. Hingga pada 2015 Iran menandatangani perjanjian nuklir atau JCPOA bersama negara P5+1 dengan imbalan pencabutan sanksi internasional terhadap Iran. Kesepakatan ini menjadi langkah besar Rouhani untuk dapat bergabung dengan SCO sebagai anggota tetap.

Dibentuk pada tahun 2001, SCO dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi regional yang cukup baru dalam lingkungan internasional. Meskipun tergolong baru, SCO memiliki potensi di bidang politik, militer, dan ekonomi yang kuat. Dengan kewasannya yang cukup luas, yakni mencakup Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur. Maka masuknya SCO dalam salah satu daftar kebijakan luar negeri Iran menjadi agenda pemenuhan kebutuhan nasional Iran yang berusaha dicapai Rouhani. Rouhani juga berusaha untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tetangga, termasuk Asia Tengah,

dengan tujuan untuk mengatasi hambatan yang ada dan untuk mencari peningkatan potensi kedua belah pihak di hal perdagangan, investasi, dan pengaruh timbal balik. Sebagai organisasi yang memiliki peran kerjasama multilateral termasuk di bidang ekonomi. SCO menjadi platform yang dituju Rouhani guna ikut membenahi kondisi ekonomi Iran. Kerjasama ekonomi SCO dapat memberikan perubahan baik dalam bidang kerjasama investasi, maupun pembangunan infrastruktur di negara – negara anggota SCO.

Iran kembali mendapatkan tekanan Amerika Serikat pada 2018, ketika Presiden Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA. Kemudian disusul dengan penerapan sanksi ekonomi kembali untuk Iran. Hal ini membuka kembali pertikaian antara Iran dan Amerika Serikat yang sempat teredam pada masa pemerintahan Barack Obama. Di tengah tekanan ini, Iran mencari dukungan internasional untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Dukungan internasional mampu meningkatkan otonomi Iran dalam menahan ancaman Amerika Serikat.

KTT SCO pada Juni 2018 menjadi kesempatan Rouhani untuk meminta dukungan dengan para petinggi negara anggota SCO. Apalagi Cina dan Rusia memiliki pengaruh kuat sebagai anggota utama SCO sekaligus anggota DK PBB yang terikat dalam JCPOA. Sebagai hasil dari KTT tersebut, negara anggota SCO menyatakan dukungannya untuk terus mempertahankan dan menerapkan JCPOA. Negara anggota menyerukan agar pihak-pihak yang terkait dengan JCPOA untuk memastikan implementasi perjanjian tersebut secara penuh dan efisien serta menyerukan perdamaian dan stabilitas global. Maka jika Iran hadir sebagai negara anggota tetap di SCO, Iran dapat memperluas pengaruhnya guna mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota SCO, termasuk dukungan melalui kerjasama ekonomi. Kelanjutan JCPOA sangatlah penting agar akses Iran ke dalam SCO tidak lagi terhambat.